

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	xxxiv
KATA PENGANTAR	lviii
DAFTAR ISI	lxi
DAFTAR TABEL	lxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
1. Manfaat Secara Teoritis	15
2. Manfaat Secara Praktis	15
E. Kerangka Konseptual	16
F. Kerangka Teori	23
1. Teori Keadilan Pancasila sebagai <i>Grand Theory</i>	26
2. Teori Sistem Hukum sebagai <i>Middle Theory</i> ..	36
3. Teori Hukum Progresif sebagai <i>Applied Theory</i>	46
G. Kerangka Pemikiran	62
H. Metode Penelitian	64
1. Paradigma Penelitian Konstruktivisme	64
2. Metode Pendekatan	64
3. Spesifikasi Penelitian	65
4. Lokasi Penelitian	66
5. Subjek dan Objek Penelitian	66
6. Sumber Data Penelitian	67
7. Teknik Pengumpulan Data	70
8. Teknik Penyajian Data	71
9. Metode Analisis Data	71
I. Originalitas Disertasi	72
J. Sistematika Penulisan	74
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	77
A. Sistem Peradilan Pidana	77
1. Paradigma Universal Teori Sistem Peradilan	

	Pidana	77
	2. Model Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ...	84
	3. Asas-asas Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	97
	4. Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Peraturan Perundang Undangan	104
B.	Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	111
	1. Penahanan	111
	2. Alasan, Syarat, dan Tujuan Penahanan	115
C.	Penahanan Dalam Perspektif Islam	118
BAB III	KEWENANGAN HAKIM DALAM MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA	131
A.	Paradigma Kekuasaan Kehakiman	131
B.	Tugas Dan Peran Peradilan	135
C.	Kedudukan Dan Kewenangan Hakim	138
	1. Kedudukan Hakim	138
	2. Kewenangan Hakim	143
D.	Pengawasan Terhadap Hakim	148
BAB IV	KELEMAHAN KEWENANGAN HAKIM MELAKUKAN PENAHANAN KEPADA TERDAKWA TIDAK BERBASIS NILAI KEADILAN	156
A.	Kelemahan Kewenangan Penahanan Perspektif Hak Asasi Manusia	156
B.	Kelemahan Hakim Melakukan Penahanan	164
C.	Independensi Kekuasaan Kehakiman Terhadap Kewenangan Hakim Melakukan Penahanan	173
BAB V	REKONSTRUKSI KEWENANGAN HAKIM DALAM MELAKUKAN PENAHANAN BERBASIS NILAI KEADILAN	178
A.	Penahanan Dalam Perbandingan Sistem Hukum Di Beberapa Negara.....	178
	1. Perbandingan Sistem Hukum	178
	2. Penahanan Tersangka/Terdakwa Dalam Hukum Islam	182
	3. Penahanan Tersangka/Terdakwa Dalam Hukum Arab Saudi	188
	4. Penahanan Tersangka/Terdakwa Dalam Hukum Malaysia	195
B.	Rekonstruksi Nilai	204
C.	Rekonstruksi Norma	230
	1. Kewenangan Hakim Melakukan Penahanan	230
	2. Pengawasan Terhadap Kewenangan Penahanan	237

BAB VI	PENUTUP	253
	A. Kesimpulan	253
	B. Saran	254
	C. Implikasi Kajian Disertasi	255
	1. Implikasi Teoritis	255
	2. Implikasi Praktis	255
	DAFTAR PUSTAKA	256
	LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL/BAGAN/SKEMA

	Halaman
Tabel 1 Rincian Jangka Waktu Penahanan	8
Tabel 2 Kerangka Pemikiran	63
Tabel 3 Orginalitas Disertasi	73
Tabel 4 Sistem Peradilan Pidana Anak	97
Tabel 5 Sistem Peradilan Pidana Dewasa	97
Tabel 6 Rekonstruksi Pasal 20 KUHAP	243
Tabel 7 Rekonstruksi Pengalihan Kewenangan Penahanan Dalam KUHAP	245

